**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) TERHADAP BELANJA DAERAH SE JAWA TIMUR**

Saiful Hidayat

*(Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Kanjuruhan Malang)*

*Email:* *Saiful2793@yahoo.com*

Drs. Anwar Made, M.Si., Ak., CA

Doni Wirshandono Y, SE., M.Ak., Ak., CA

*(Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Kanjuruhan Malang)*

**ABSTRAK:** *Salah satu ketetapan MPR-RI Nomor XV/MPR/1998 atas penyelenggaraan otonomi daerah. Hal ini Merupakan landasan hukum dari dikeluarkannya UU UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antar pemerintah pusat dan daerah sebagai dasar penyelenggaraan otonomi daerah. Daimana dalam undang-undang tersebut lebih menegaskan bahwa untuk pelaksanaan Otonomi Daerah, Pemerintah pusat akan mentransfer dana perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Bagian Daerah Dari Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak. Disamping itu Pemerintah Daerah diharapkan mampu memenuhi kebutuhan Belanja Daerahnya melalui PAD, maupun sumber-sumber penerimaan lainnya.*

*Penelitian ini menggunakan data sekunder yang didapat dari dokumen laporan realisasi APBD melalui website* [*http://www.djpk.depkeu.go.id*](http://www.djpk.depkeu.go.id) *pada tahun 2012-2014 yaitu berupa jumlah anggaran Belanja Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi dan studi pustaka. Teknik analisis data yang digunakan adalah: analisis kuantitatif.*

*Hasil penlitian mununjukkan nilai signifikansi pada uji-F yaitu sebesar 0.018 yang lebih kecil dari alpa 0.05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) yang secara simultan berpengaruh terhadap Belanja Daerah*

***Kata Kunci*:** *Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah, dan Belanja Daerah*

**LATAR BELAKANG**

Kemajuan daerah yang ada di Indonesia saat ini semakin pesat, seiring dengan pelaksanaan pemusatan otonomi daerah, serta desentralisasi fiskal. Seperti yang dimuat dalam UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Daerah, memberikan harapan baru terhadap tumbuhnya kesadaran untuk membangun daerah secara lebih optimal, tidak lagi terkosentrasi dipusat. Namun dipihak lain, otonomi daerah menghadirkan kekhawatiran munculnya “desentralisasi masalah dan desentralisasi kemiskinan”. Artinya pelimpahan masalah dan kemiskinan yang selama ini tidak mampu ditangani dan diselesaikan dengan baik oleh pemerintah pusat.

Pemerintah daerah dapat berjalan dengan baik karena adanya dukungan dari berbagai faktor sumber daya yang mampu menggerakkan jalannya roda organisasi pemerintahan dalam rangka pencapaian tujuan. kewenangan daerah. Dalam hal ini pengelolaan anggaran daerah, asas kemandirian dijadikan dasar Pemerintah Daerah untuk mengoptimalkan penerimaan dari daerahnya sendiri yaitu dari sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD) . Seperti yang dimaut dalam Undang-undang No.32 Tahun 2004, tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan Pemerintah Daerah yang berasal dari daerah itu sendiri berdasarkan kemampuan yang dimiliki dan berlakunya undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah, membawa perubahan mendasar pada sistem dan mekanisme pengelolaan pemerintah daerah. UU ini menegaskan bahwa untuk pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah, pemerintahan pusat akan mentransferkan dana perimbangan kepada pemerintah daerah. Dana perimbangan tersebut terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan bagian daerah dari bagi hasil pajak pusat. Seperti dana perimabangan yang diterima oleh setiap pemerintah kabupaten dan kota yang ada di Jawa Timur itu sendiri.

Dengan besarnya PAD dan DAU yang diterima oleh pemerintah Kabupaten dan Kota yang ada di Jawa Timur secara khusus yang di mulai dari tahun 2013-2014, menujukan adanya pergerakan yang positif terhadap penerimaan daerah baik dari sektor PAD maupun yang berasal dari DAU sendiri. Hal ini cukup ideal dalam mewujutkan otonomi daerah yang lebih baik kedepannya.

Maka berdasarkan atas pertimbangan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Kabupaten dan Kota Se Jawa Timur yang berkenaan dengan pengalokasian belanja daerah pada pemerintahan daerah setempat yang tertuang didalam skripsi dengan judul “Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah Di Kabupaten Dan Kota Sejawa Timur”.Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh DAU, PAD terhadap belanja daerah Kabupaten dan Kota sejawa Timur.

**Tinjauan Teoritik**

Dalam pelaksanaan otonomi daerah pemerintah daerah diberi hak, kewenangan, dan kewajiban untuk mengatur daerahnya masing-masing. Setiap daerah memiliki sumber keuangan sendiri yang disebut PAD ,terdiri dari Pajak daerah, Retribusi daerah, Penerima anlain-lain, Dana perimbangan, Pinjaman Daerah yang sah. Belanja Daerah meliputi: Belanja Rutin, Belanja Investasi, Pengeluaran Transfer, Pengeluaran tidak terduga. Dan berdasarkan pada penelitian terdahulu yaitu seperti yang dilakukan oleh: Fhino Andrea Christy dan Priyo Hari Adi (Dalam Penelitiannya yang berjudul **Hubungan antara dana alokasi umum belanja daerah.** Hasil penelitian mendapatkan bahwa pengujian tentang pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Belanja Modal (BM) konsisten dengan penelitian sebelumnya. Besarnya Belanja pemerintah daerah selama ini sangat ditentukan oleh factor Dana Alokasi Umum), dan Kesit Bambang Prakosa (Dalam Penelitiannya yang berjudul **Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah**.Menyatakan Bahwa semakin besar Dana Alokasi Umum yang diterima oleh daerah dari pemerintah pusat dan Pendapatan Asli Daerah yang didapatakan menentukan besarnya alokasi Belanja Daerah) dan juga didukung oleh pengujian hipotesis dimana terdapat pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Pemerintah Kabupaten dan Kota Se Jawa Timur

**Metode Penelitian**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Sumber data dari dokumen laporan realisasi APBD yang diperoleh dari situs Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah melalui website <http://www.djpk.depkeu.go.id> Dari laporan realisasi APBD tahun 2012-2014 dapat diperoleh data mengenai jumlah anggaran Belanja Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU)

Variabel penelitian yang digunakan meliputi: Variabel independent (Dana alokasi umum & pendapatan asli daetah), Variabel dependen (Belanja Daerah). Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi dan studipustaka. Teknik analisis data yang digunakan adalah: analisis kuantitatif.

**Hasil Penelitian dan Pembahasan**

1. Uji Asumsi Klasik yang digunakan adalah uji normalitas, uji autokorelasi dan uji heterokedastisitas dan uji multikolinearitas.
2. Hasil Uji Asumsi Klasik Normalitas

Menggunakan SPSS versi 22 hasil Uji Asumsi Klasik Normalitas dengan pendekatan Kolmogorov-Smirnovs Z yang disajikan pada lampiran 3. Pada lampiran tersebut tanpak bahwa nilai Asymp. Sig. (2-tailed), 210 yang melebihi alpa 5% yang berarti bahwa data variabel pengganggu memiliki distribusi normal. Jadi, model regresi memenuhi asumsi normalitas seperti pada tebel 4.3. Dari tabel tersebut perhitungan diatas dapat kita lihat bahwa nilai Asymp.sig. (2-tailed) , 210 yang melebihi alpa 5% sehingga data yang digunakan dapat dikatakan berdistribusi normal serta dapat disimpulkan bahwa PAD, DAU dan Belanja Daerah dapat memenuhi Uji Normalitas

1. Hasil Uji Asumsi Klasik Multikolinieritas

Hasil dari dari uji asumsi klasik multikolinieritas dengan menggunakan pendekatan VIV (*Variance Inflation Factor*) yang disajikan pada lampiran 4. Dimana pada lampiran tersebut tanpak bahwa nilai VIF pada variabel PAD yaitu sebesar 5.328 dan pada variabel DAU yaitu sebesar 5.328 yang lebih kecil dari 10. Hal tersebut mengindikasikan bahwa tidak terjadi multikolinieritas. Dan untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.4

1. Hasil Uji Asumsi Klasik Autokorelasi

Pada pengujian hasil uji asumsi klasik autokorelasi yang menggunakan pendekatan Durbin Watson 1.786 yang terletak diantara 1,5 dan 2,5. Hal ini mengindikasikan bahwa tidak terjadi autokorelasi. Dan untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.5.

1. Hasil Uji Asumsi Klasik Heteroskedastisitas

Hasil dari uji asumsi klasik heteroskedastisitas dengan menggunakan pendekatan Scatterplot yang di sajikan pada lampiran 4. Pada gambar tersebut tampak bahwa grafik plot menunjukan bentuk yang tidak beratran atau tidak membentuk sebuah pola tertentu. Hal ini mengindikasikan bahwa tidak terjadinya heteroskedastisitas. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 4.1.

1. Hasil Uji Hipotesis
2. Nilai signifikansi uji-t variable Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu sebesar 0.000 yang lebih kecil dari alpa 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara parsial berpengaruh terhadap Belanja Daerah. Dengan demikian, hipotesis pertama yang menyatakan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang secara parsial berpengaruh terhadap Belanja Daerah yang didukung juga dengan data, sehingga hasil uji hipotesisnya dapat diterima.
3. Nilai signifikansi uji-t variable Dana Alokasi Umum (DAU) yaitu sebesar 0.000 yang lebih kecil dari alpa 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variable Dana Alokasi Umum (DAU) secara parsial berpengaruh terhadap Belanja Daerah. Dengan demikian, hipotesis kedua yang menyatakan bahwa variabel Dana Alokasi Umum (PAD) yang secara parsial berpengaruh terhadap Belanja Daerah yang didukung juga dengan data, sehingga hasil uji hipotesisnya dapat diterima.
4. Pada lampiran tersebut tanpak bahwa nilai signifikansi pada uji-F yaitu sebesar 0.018 yang lebih kecil dari alpa 0.05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) yang secara simultan berpengaruh terhadap Belanja Daerah. Dengan demikian, hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) yang secara simultan berpengaruh terhadap Belanja Daerah yang didukung dengan data, sehingga hasil dari uji hipotesis ketiga tersebut diterima.

**Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Modal**

Hasil penelitian dalam variabel ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki pengaruh paling besar terhadap besaran Belanja Daerah oleh Karena itu, pihak pemerintah kota dan pemerintah kabupaten di Jawa Timur hendaknya lebih memperhatikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam upaya membiayai Belanja Daerah. Menurut Sidik (2012), seiring dengan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), diharapkan tingkat kemandirian pemerintah daerah semakin meningkat. Tingkat kemandirian ini ditunjukan dengan meningkatkan konteribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk mendanai Belanja Daerah yang akan di keluarkan oleh setiap daerah baik berupa Belanja Operasi maupun berupa Belanja Modal. Adanya ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat harus dapat dikurangi agar pemerintah daerah lebih mandiri dalam menentukan belanja daerahnya

**Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Tehadap Belanja Daerah**

Hasi dari penelitian ini menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah yang artinya jika sebuah Dana Alokasi Umum (DAU) ditingkatkan, maka belanja daerah yang dikeluarkan oleh setiap daerah juga akan meningkat.

Undang-Undang No.33 Tahun 2004 diterangkan bahwa untuk pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah, pemerintah pusat mentransfer Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum, dan bagian daeah dari bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak. Dana Alokasi Umum (DAU) yang memengang peranan penting dan yang sangat dominan bila dibandingkan dengan sumber dana dari penerimaan-penerimaan dari pemerintah pusat seperti Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun dana Kontijensi (penyeimbangan). Untuk itu, diharapkan dengan tingginya penerimaan Dana Alokasi Umum (DAU) yang di terima oleh setiap pemerintah daerah yang ada di Jawa Timur dapat dipergunakan secara efektif dan efisien untuk dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sebagai tujuan dari desentralisasi, yaitu untuk mempercepat pembangunan serta penda[atan daerah disamping tetap memaksimalkan potensi-potensi daerah untuk dapat membiayai kebutuhan daerah itu sendiri.

**Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Belanja Daerah**

Hasil penelitian dalam variabe ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki pengaruh positif terhadap Belanja Daerah, karena Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memiliki pengaruh paling besar terhadap Belanja Daerah yang dikeluarkan oleh setiap pemerintah Kabupaten dan Kota khususnya yang ada di Jawa Jimur, serta Dana Alokasi Umum (DAU) yang juga berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah yang artinya jika pada Dana Alokasi Umum (DAU) ditingkatkan maka besaran belanja yang dikeluarkan oleh daerah juga akan mengalami peningkatan.

**Kesimpulan**

Pada variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan variabel paling besar pengaruhnya terhadap Belanja Daerah. Hal ini ditunjukan oleh adannya nilai kekoeifisien regeresi variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan lebih besar dari nilai kekoefesien regeresi pada variabel Dala Alokasi Umum (DAU). Selanjutnya, adanya perubahan Belanja Daerah 71,9 persen yang merupakan dipengaruhi oleh besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) dan sisanya yaitu sebesar 28,1 persen dimana di pengaruhi oleh beberapa variabel lain.

Dari penelitian tersebut kita dapat mengetahui bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) sama-sama mempengaruhi besaran Belanja Daerah yang di keluarkan oleh pemerintah Kabupaten dan Kota Se Jawa timur dalam satu tahun. Meski dalam penelitian ini pengaruh Variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh paling besar terhadap Belanja Daerah yang dikeluarkan oleh setiap pemerintah daerah dan bila kita bandingkan dengan variabel Dana Alokasi Umum (DAU) yang tidak terlalu besar pengarunya terhadap Belanja Daerah yang dialokasikan oleh setiap daerah Kabupaten dan Kota Se Jawa Timur dalam satu tahun berjalan

**Daftar Pustaka**

Undang – Undang No. 32 tahun 2004 *tentang Pemerintah Daerah*

Undang-Undang No. 33 tahun 2004 *tentang perimbangan keuangan antar pemerintah pusat dan daerah*

[*http://www.djpk.depkeu.go.id*](http://www.djpk.depkeu.go.id)